

## Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam

Sefriameli  
Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi  
Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi  
[Sefriameli1984@gmail.com](mailto:Sefriameli1984@gmail.com)

Khairul  
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Imam Bonjol Padang  
Jalan Koto Tinggi No 5, Jati Baru Kota Padang  
[65khairul65@gmail.com](mailto:65khairul65@gmail.com)

### Article's History:

Received 19 Agustus 2023; Received in revised form 8 September 2023; Accepted 11 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

### Suggested Citation:

Sefriameli., & Khairul. (2023). Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5). 2278-2290. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1612>

### Abstrak

Pariwisata merupakan industri yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Salah satu objek wisata yang menjadi fokus pengembangan adalah Linggai, yang telah mengalami peningkatan anggaran pembangunan dari tahun 2017 hingga 2021. Meskipun pemerintah daerah serius dalam mengembangkan Linggai, implementasi dari kebijakan pembangunan destinasi pariwisata ini belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi implementasi pembangunan destinasi pariwisata, khususnya objek wisata Linggai, di Kabupaten Agam dengan menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai belum efektif karena beberapa faktor. Kemudian dalam penelitian ini juga terlihat bahwa objek wisata Linggai belum menyumbang lebih dari 10% dari total target kunjungan objek wisata Kabupaten Agam. Hal ini menunjukkan bahwa upaya promosi dan peningkatan kualitas layanan perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Agam lebih fokus dalam mengatasi kendala aksesibilitas dan sarana prasarana di sekitar objek wisata Linggai. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam memajukan pariwisata daerah ini.

**Kata Kunci:** mplementasi, pembangunan pariwisata, objek wisata Linggai.

**JEL Classification:** L90, L91, L96

### PENDAHULUAN

Kabupaten Agam merupakan daerah yang memiliki banyak potensi kepariwisataan mulai dari seni dan budaya. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Agam itu tersebar di banyak wilayah Kabupaten Agam. Banyaknya potensi yang kaya akan nilai budaya tersebut terdapat beberapa yang sangat di unggulkan di Kabupaten Agam itu sendiri. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang bertujuan mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang didalamnya tertuang objek wisata Linggai pada beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Agam, diantaranya pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2015-2030, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021- 2041. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan hukum lahirnya kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Agam.

Terhitung sudah 7 (Tujuh) tahun sejak ditetapkannya kebijakan ini, pelaksanaannya belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Agam Tahun 2015-2030 yang tertera dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016. Didalamnya termasuk untuk pembangunan dan pengembangan Objek Wisata Linggai. Objek wisata Linggai menjadi salah satu objek wisata yang terus dikembangkan setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 hingga 2021. Dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Anggaran Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai**

NO	Tahun	Total Anggaran Pembangunan Objek Wisata Linggai
1	2017	± 2,2 M
2	2018	± 2,4 M
3	2019	± 4.6 M
4	2020	± 2 M
5	2021	± 0,5 M

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 2023

Pada tabel di atas terlihat Pemerintah Kabupaten Agam sangat serius dalam pengembangan objek wisata Linggai, terhitung kurang lebih 11,7 M telah digelontorkan untuk pembangunan objek wisata Linggai. Anggaran yang tidak sedikit ini merupakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Agam. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membangun objek wisata seluas 15.769 meter persegi (Antara Sumbang, 2017).

Pembangunan objek wisata Linggai bertujuan untuk mengimplementasikan panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan, namun pada kenyataannya belum ada standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut tercantum dalam permasalahan dalam pelayanan pembangunan objek wisata dalam Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Namun, masih ada beberapa program kerja yang baik itu belum dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan secara maksimal, seperti dukungan pemerintah dalam hal bantuan pengadaan fasilitas *homestay* disekitar kawasan objek wisata Linggai. Kehadiran *homestay* memang diperlukan mengingat banyaknya wisatawan-wisatawan khususnya wisatawan asing yang setelah berkunjung ke objek wisata Linggai memilih menginap di daerah Bukittinggi karena di kawasan sekitar objek wisata Linggai belum memiliki fasilitas penginapan yang mampu menampung para wisatawan tersebut, sedangkan apabila kehadiran *homestay* sudah terlaksana maka hal tersebut juga akan menambah pendapatan bagi masyarakat sekitar objek wisata Linggai dan Maninjau pada umumnya.

Kawasan Maninjau merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), tetapi pemerintah belum maksimal dalam mewujudkan Maninjau dan Linggai khususnya sebagai Desa Wisata. Proses ini juga terdapat dalam proses pengenalan “Desa Wisata” yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hal tersebut terlihat dari masih kurangnya fasilitas sarana prasarana pendukung Desa Wisata mulai dari pelatihan untuk *tour guide*, maupun infrastruktur seperti penunjuk arah menuju Desa Wisata. Hal tersebut dikhawatirkan kurangnya manfaat yang dirasakan dengan jumlah pengunjung yang semakin meningkat setiap tahunnya seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Data Kunjungan Kawasan Objek Wisata Linggai 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah Kunjungan	Target Kunjungan Wisata Kab. Agam	Kontribusi Linggai dalam Target Kunjungan Wisata Kab. Agam
1	2020	9.232	669.618	1.37%
2	2021	34.272	676.382	5.06%

3	2022	59.809	683.146	8.75%
---	------	--------	---------	-------

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Terlihat bahwa dalam implementasinya, objek wisata Linggai belum menyumbangkan 10% dari total target kunjungan objek wisata Kabupaten Agam. Hal ini memunculkan persoalan baru, bahwasanya objek wisata Linggai tergolong objek wisata baru yang seharusnya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah. Jika implementasi kawasan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan maka seharusnya tingkat kunjungan bisa ditingkatkan dengan berbagai kegiatan promosi.

Hasil dari penelusuran terkait pembangunan destinasi pariwisata menggambarkan belum adanya topik spesifik Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai. Dengan tujuan untuk menjelaskan faktor dominan yang mempengaruhi implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah Kabupaten Agam khususnya objek wisata Linggai. Sehingga pada hasil riset ini nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi/saran yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Maka implementasi dari kebijakan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata ini menjadi salah satu strategi dalam mencapai visi tersebut. Apabila kondisi pelaksanaan atau implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Agam yang saat ini belum efektif dibiarkan, maka pencapaian misi pembangunan Kabupaten Agam dikhawatirkan sulit untuk dicapai. Melalui penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan pariwisata, diharapkan akan meningkatkan efektifitas implementasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dan sinergitas stakeholders antara pemerintah, swasta (pengusaha), serta masyarakat menjadi dasar dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang juga akan berdampak pada keberhasilan pengembangan suatu wilayah.

Sejalan dengan penelitian (Ida Ayu Diah Laksmi Gayatri, 2020) bahwasanya Implementasi pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida juga terdapat kendala dalam pelaksanaanya dalam hal ini kendalanya pada aksesibilitas, sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hal itu maka pemerintah daerah harus konsisten dalam pembangunan pariwisata. Sesuai dengan itu, dalam penelitian Pakhudin dan kawan-kawan (Pakhudin, Arenawati, 2022) tahun 2021 mengenai Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten, menyatakan perlunya komitmen yang kuat dari kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata, juga pemerintah daerah harus segera membenahi pembangunan sarana kawasan penunjang wisata, sehingga bisa difungsikan dengan baik sesuai dengan tujuan pariwisata. Dari hasil penelitian terdahulu yang telah diterangkan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persoalan pariwisata setiap daerah memiliki kemiripan, dimana persoalan aksesibilitas dan sarana prasarana menjadi hal yang utama, dimana ini menjadi tantangan utama bagi daerah yang akan dikembangkan pariwisatanya. Maka berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata

Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata adalah suatu proses pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di suatu kawasan agar mampu menarik minat wisatawan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa pariwisata memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi suatu kawasan, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Pengembangan kawasan pariwisata dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, pengembangan produk wisata, dan lain-lain. Namun, dalam pengembangan kawasan pariwisata, perlu diperhatikan berbagai aspek, seperti keberlanjutan, konservasi lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, konsep pengembangan kawasan pariwisata juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya setempat serta memberikan manfaat. Kawasan pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dikembangkan dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Kawasan pariwisata ini biasanya memiliki potensi alam atau kebudayaan yang menarik, fasilitas pendukung pariwisata, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang aktivitas pariwisata (M. N. Nafi'an dan E. Yuliana, 2018).

### **Pengembangan Wilayah Pariwisata**

Pengembangan wilayah pariwisata dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di suatu negara. Namun, dalam pengembangan wilayah pariwisata juga perlu diperhatikan dampak negatif yang mungkin terjadi, seperti peningkatan polusi, kerusakan lingkungan, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pengembangan wilayah pariwisata yang berkelanjutan juga dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat, seperti peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi. Namun, untuk mencapai hal ini perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata. (Saiful, M., & Harun, 2019).

### **Perencanaan Pengembangan**

Perencanaan pengembangan wilayah pariwisata adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan potensi wisata suatu wilayah secara terpadu dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri pariwisata, masyarakat setempat, dan lain sebagainya. (Direktorat Jenderal Pariwisata, 2014). Perencanaan pengembangan wilayah pariwisata meliputi beberapa tahapan, seperti identifikasi potensi wisata, analisis pasar, pengembangan produk wisata, peningkatan aksesibilitas, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Dengan melakukan perencanaan pengembangan wilayah pariwisata yang baik, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, perlu diingat bahwa pengembangan wilayah pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain kerusakan lingkungan, kerusakan sosial budaya, dan konflik antara masyarakat setempat dan pelaku industri pariwisata. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan wilayah pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.

### **Implementasi Pengembangan Kawasan Pariwisata**

Implementasi kawasan pariwisata adalah tahap pelaksanaan dari rencana pengembangan kawasan pariwisata yang sudah disusun. implementasi ini meliputi pembangunan infrastruktur, pemasaran, promosi, dan pengelolaan kawasan pariwisata secara keseluruhan (sefira ryalita primadany, mardiyono, 2015). tujuan dari implementasi kawasan pariwisata adalah untuk mengoptimalkan potensi kawasan pariwisata dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar.

George C Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Pendekatan yang diterimakan oleh George C Edward III yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul "dasar-dasar Kebijakan Publik" (2017:136-142), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) stuktur birokrasi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang sangat berpengaruh dengan keberhasilan penelitian yaitu di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dan Objek Wisata Linggai Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. (Sugiyono, 2014)

Dalam proses analisa data, ada tiga tahapan yang akan dilakukan, yaitu:

#### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lamapeneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara hingga sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. dengan melihat penyajian-penyajian, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dari penyajian-penyajian tersebut. (Wahidmurni, 2008)

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu objek. (Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai

Implementasi pengembangan menurut George C. Edward III dipengaruhi oleh 4 variabel utama yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Berikut adalah hasil analisis dari implementasi pengembangan pembangunan destinasi pariwisata Linggai dalam RIPKA Kabupaten Agam.

#### a) Komunikasi

Komunikasi yang efektif memastikan penyampaian informasi yang jelas dan akurat tentang rencana pengembangan kawasan pariwisata Linggai kepada semua pihak terkait. Informasi yang disampaikan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilakukan. Semenjak tahun 2016 pemerintah gencar melaksanakan sosialisasi terhadap pembangunan kawasan pariwisata linggai baik secara langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui media sosial. Dalam wawancara dengan KDPPO juga menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai berikut:

*“Jika objek wisata Linggai sukses dapat menciptakan peluang ekonomi baru untuk masyarakat setempat. Para wisatawan akan menghabiskan uang mereka untuk akomodasi, makanan, souvenir, dan layanan lokal lainnya, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi penduduk setempat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dan dalam pengembangannya Pembangunan objek wisata memerlukan tenaga kerja lokal, baik untuk pembangunan maupun untuk mengelola dan menyediakan layanan wisata, masyarakat sejatinya diharapkan berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan ini.”*

Partisipasi publik: Komunikasi yang efektif juga melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah dan stakeholder pariwisata perlu melibatkan masyarakat lokal dan mendengarkan pandangan serta masukan mereka. Komunikasi terbuka dan dialog yang terjalin dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengembangan pariwisata Linggai. Dalam hal ini pada tahun 2017-2021 pembangunan linggai selalu masuk didalam MUSREMBANG Kecamatan Tanjung Raya hal ini dibuktikan dari pembangunan kawasan linggai semenjak 2017 hingga 2021 dengan anggaran seperti tabel berikut.

**Tabel 3. Anggaran Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai**

NO	Tahun	Total Anggaran Pembangunan Objek Wisata Linggai
1	2017	± 2,2 M
2	2018	± 2,4 M
3	2019	± 4.6 M
4	2020	± 2 M
5	2021	± 0,5 M

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 2023

Pada tabel di atas terlihat Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sangat serius dalam pengembangan pariwisata Linggai, terhitung kurang lebih 11,7 M telah digelontorkan untuk pembangunan objek wisata Linggai. Penyebaran promosi pariwisata: Komunikasi juga berperan penting dalam penyebaran promosi pariwisata Linggai. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web, brosur, dan kampanye pemasaran, informasi mengenai potensi pariwisata Linggai dapat disampaikan kepada wisatawan potensial. Komunikasi yang efektif dalam promosi pariwisata dapat meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan. Promosi kawasan linggai gencar dilaksana baik media online maupun media sosial, seperti yang dikutip dari berita online berikut:

*"Kabupaten Agam memiliki keindahan alam yang cukup komplit. Mulai dari panorama bukit barisan yang menawan, wisata bahari yang memukau dan teranyar pesona Danau Maninjau. Baru-baru ini muncul destinasi wisata Linggai Park yang konon jadi penyempurna kepingan puzzle wisata Danau Maninjau."(Selvia, 2021)*

Kolaborasi antar sektor: Komunikasi yang baik memfasilitasi kolaborasi antar sektor dalam implementasi rencana pengembangan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan efektif antara sektor pariwisata dengan sektor pendidikan, infrastruktur, transportasi, keamanan, dan sektor lainnya, dapat tercipta sinergi yang mendukung pengembangan pariwisata Linggai dari 2017 hingga 2022 pembangunan objek wisata Linggai di koordinasikan bagus dengan beberapa sektor seperti , Bappeda, Dinas PU, Dinas DPMN, dan beberapa OPD lainnya, hal ini dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lancar, sehingga pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini juga Dinas DPMN melakukan sosialisasi kepada nagari dan masyarakat sekitar objek wisata Linggai, agar pembangunan berjalan dengan aman dan tidak ada tuntutan dari masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat lokal: Komunikasi yang baik juga memungkinkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif, masyarakat lokal dapat diberikan pemahaman dan keterlibatan yang lebih baik dalam kegiatan pariwisata. Masyarakat lokal dapat memberikan masukan, ide, dan kontribusi yang berharga dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi yang bagus dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat diharapkan menyediakan fasilitas pendukung seperti homestay, tempat kuliner dan yang lainnya. Melalui dinas koperasi dan umkm masyarakat sekeliling juga di bina dalam pengembangan UMKM, seperti pengolahan rinuak, pensi, seperti yang sudah kita ketahui rinuak menjadi icon makanan khas maninjau, dengan adanya ini secara tidak langsung juga mempromosikan makanan khas maninjau sehingganya pembangunan kawasan objek wisata Linggai ini sesuai dengan yang dituliskan dalam RIPKA. Juga di sampaikan oleh KBS bahwa:

*"pembangunan objek wisata Linggai dapat memotivasi masyarakat setempat untuk melestarikan budaya dan lingkungan mereka, karena menjadi nilai jual dan daya tarik bagi para wisatawan. Hal ini bisa menghasilkan upaya pelestarian dan kesadaran terhadap warisan budaya dan alam, artinya dalam pembangunan Objek Wisata Linggai juga tidak lepas dari memberdayakan masyarakat akan budaya lokalnya, yang mengetahui budaya lokal adalah masyarakat lokal itu sendiri. Jadi hal ini sesuai dengan RIPKA".*

Dalam keseluruhan implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, komunikasi yang efektif menjadi pondasi yang penting untuk mencapai tujuan pengembangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pengembangan objek pariwisata khususnya Linggai secara regulasi telah tersusun dari RPJPD hingga RKPD Kabupaten Agam, dimana hal ini menjadi modal awal dalam implementasi pengembangan kawasan linggai dalam RIPKA. Kalaborasi antar dinas juga menjadi aspek utama dalam pembangunan objek wisata Linggai ini sehingga pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

#### **b) Sumber daya**

Dalam implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Sumber daya dalam konteks ini mencakup berbagai aspek yang mendukung pengembangan pariwisata, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya infrastruktur.



Sumber daya Alam: Kawasan pariwisata Linggai memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, seperti keindahan alam, panorama, objek wisata alam, dan kekayaan flora dan fauna. Sumber daya alam ini dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dalam implementasi rencana pengembangan, perlu dilakukan pemetaan dan pengelolaan yang baik untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta memastikan penggunaannya yang berkelanjutan. Jika dilihat dari sejarahnya Objek Wisata Linggai sudah dari tahun 80-an menjadi primadona pariwisata dengan keindahan alamnya, seperti yang disampaikan oleh SDPPO bahwa:

*“Linggai merupakan objek wisata yang terletak di Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Objek dimaksud pernah jaya pada tahun 1980-an. Dari berbagai pelosok wisatawan berdatangan, termasuk dari provinsi tetangga, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Namun, objek wisata yang terletak di tepian Danau Maninjau itu, akhirnya ditinggalkan pengunjung. Penyebabnya, objek dimaksud terendam air danau, sebagai dampak pembangunan PLTA Maninjau”.*

Seperti yang dijelaskan oleh sekretaris di atas, dalam perjalanan waktunya OW Linggai telah ditinggalkan, tetapi Pemerintah Kabupaten Agam konsisten dalam pembangunannya dari 2017. Hal ini karena Sumber Daya Alam di Kawasan Linggai memang menampilkan view yang bagus.

Sumber daya Manusia: Sumber daya manusia termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, pemilik usaha pariwisata, dan pelaku industri pariwisata. Melibatkan sumber daya manusia secara aktif dalam implementasi rencana pengembangan sangat penting. Masyarakat lokal dapat berperan sebagai pemandu wisata, penyedia layanan, dan menjaga kelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata. Pemilik usaha pariwisata dapat berperan dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia juga penting melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata.

Bagi masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas wisata akan terpengaruh oleh kebijakan pembangunan pariwisata, karena dengan adanya kebijakan tersebut arahan pedoman mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata yang fokusnya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat Kabupaten Agam dalam aktivitas wisata. Namun, pada kondisi aktual masih ada kelompok masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu, dimana terjadi penolakan dari masyarakat di lingkungan kawasan daya tarik wisata terhadap kegiatan pariwisata, misalnya merasa terganggu dengan keramaian yang ditimbulkan oleh aktivitas wisata. Hal tersebut disampaikan oleh KDPPPO Kabupaten Agam, yang disampaikan dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

*” masyarakat di Kabupaten Agam ini bukan hanya terdiri masyarakat pariwisata, tetapi juga masih ada masyarakat nelayan. Nah konflik yang terjadi yaitu ketika dilakukan penataan terhadap masyarakat nelayan agar aktivitasnya tidak mengganggu pariwisata tanda kutip ya supaya membuat indah pariwisata, tetapi jika dilakukan penataan akan menimbulkan konflik. Contoh lain misalnya penataan beberapa keramba yang ada di dekat kawasan pariwisata linggai tidak semua bisa ditata ulang dikarenakan beberapa kelompok pembudidaya ikan menolak atas adanya penataan ulang didekat kawasan pariwisata linggai, mereka dalam pelaksanaan aktivitasnya pasti mengharapkan keramaian, satu sisi masyarakat disekitarnya merasa keramaian tersebut mengganggu.*

Sumber daya Finansial: Implementasi rencana pengembangan memerlukan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, promosi pariwisata, pelatihan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemeliharaan destinasi wisata. Sumber daya finansial dapat diperoleh melalui anggaran pemerintah daerah, investasi swasta, dan pendanaan dari lembaga keuangan atau organisasi internasional. Semenjak tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten Agam konsisten setiap tahunnya mengalokasikan untuk pembangunan kawasan linggai dengan total anggaran sebesar 11,7 M. “Pemerintah Kabupaten Agam Konsisten dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dalam pembangunan kawasan Linggai” ujar KBS Bappeda.

Sumber daya Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai sangat penting dalam mendukung implementasi rencana pengembangan kawasan pariwisata Linggai. Infrastruktur meliputi aksesibilitas, transportasi, akomodasi, sanitasi, fasilitas pendukung pariwisata, dan teknologi informasi. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus

dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan serta mendukung pengembangan pariwisata secara menyeluruh. Seperti yang disampaikan KBS Bappeda bahwa:

*“Untuk mendukung objek wisata Linggai, diperlukan pengembangan infrastruktur, seperti jalan, transportasi publik, sanitasi, dan air bersih. Pembangunan infrastruktur ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi penduduk lokal serta meningkatkan kualitas infrastruktur secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses para wisatawan untuk menikmati keindahan Kawasan Linggai, dan pembangunan ini gencar dilaksanakan semenjak tahun 2017”.*

Dalam implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, penting untuk mengelola sumber daya dengan baik, memanfaatkan potensi yang ada secara berkelanjutan, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal.

### c) Disposisi

Dalam implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, disposisi atau pengaturan tata kelola sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata. Disposisi melibatkan berbagai aspek terkait pengaturan, pengelolaan, dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam disposisi implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai:

1. Kebijakan dan Regulasi: Diperlukan kebijakan dan regulasi yang jelas dan mendukung untuk mengatur dan mengarahkan pengembangan pariwisata di kawasan Linggai. Hal ini meliputi peraturan terkait perizinan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kebijakan yang konsisten dan koheren akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan pariwisata.
2. Struktur Organisasi: Dalam disposisi implementasi, penting untuk memiliki struktur organisasi yang jelas dan efektif. Hal ini melibatkan pembentukan tim atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan pengembangan pariwisata Linggai. Struktur organisasi yang baik akan memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dan pemantauan progres implementasi.
3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Disposisi yang sukses membutuhkan keterlibatan aktif dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, pemilik usaha pariwisata, komunitas adat, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Melalui keterlibatan mereka, akan terbentuk sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang saling menguntungkan.
4. Koordinasi antara Sektor: Implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai sektor terkait, seperti pariwisata, transportasi, kebudayaan, lingkungan, keuangan, dan pembangunan. Koordinasi yang efektif akan memastikan sinergi dan integrasi antara berbagai kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing sektor. Seperti yang disampaikan oleh KDPPPO Kabupaten Agam, bahwa:

*“Dalam pembangunan Objek Wisata Linggai, Dinas Parpora bekerjasama dengan bergagai dinas seperti PUTR, Perkim, BAPPEDA, Dinas DPMN, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Tanjung Raya dan banyak unsur lainnya, hal ini bertujuan agar pembangunan OW linggai sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan RIPKA”*

5. Komunikasi dan Edukasi: Komunikasi yang efektif merupakan elemen penting dalam disposisi implementasi. Komunikasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan akan memastikan pemahaman yang sama terkait visi, tujuan, strategi, dan kegiatan pengembangan pariwisata Linggai. Edukasi juga penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam hal edukasi kepada masyarakat Dinas juga melakukan edukasi dalam pengembangan sektor UMKM, seperti yang disampaikan oleh KBS Bappeda bahwa :



*“Dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitaran Objek Wisata Linggai pemerintah mendorong pertumbuhan bisnis lokal, termasuk UMKM. Ketika ada peningkatan jumlah pengunjung, usaha-usaha lokal seperti restoran, toko suvenir, penyewaan kendaraan, dan pemandu wisata lokal akan mengalami peningkatan permintaan untuk produk dan layanan mereka. Dengan adanya permintaan yang meningkat, UMKM dapat tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat dan mendukung stabilitas ekonomi komunitas, hal ini dilakukan oleh bagian ekraf dan dinas UMKM dan Koperasi.”*

6. **Monitoring dan Evaluasi:** Dalam disposisi implementasi, monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur progres dan kesuksesan implementasi rencana pengembangan. Monitoring akan membantu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan memastikan bahwa tindakan korektif dapat diambil secara tepat waktu. Evaluasi akan memberikan umpan balik penting untuk penyempurnaan strategi dan kegiatan pengembangan pariwisata.

Dengan memperhatikan dan menerapkan disposisi yang tepat, implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai dapat berjalan dengan baik, memastikan keberlanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat dan lingkungan.

Implementasi pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Agam akan memberikan manfaat untuk memberikan arahan yang jelas terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan daerah dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. KDPPO Kabupaten Agam mengatakan adapun pihak-pihak yang akan menerima manfaat jika kebijakan pembangunan pariwisata ini dapat terimplementasi dengan baik diantaranya pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta (pelaku usaha). Hal tersebut disampaikan dalam wawancara bersama peneliti.

*“Sebetulnya kalau kebijakan pembangunan pariwisata ini bisa terlaksana tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak yang terkait maka akan banyak juga pihak yang mendapat manfaat, diantaranya Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Sektor Swasta”*

Manfaat implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dapat mendorong terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Agam menuju Agam Menuju Wisata Berkelas Dunia, karena visi dari kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Agam selaras dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Agam. Selain itu dengan terimplementasinya kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah. Manfaat untuk masyarakat dengan implementasi akan membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata, baik melalui peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam usaha pariwisata, pengembangan desa wisata maupun melalui pengembangan UMKM di sektor ekonomi kreatif.

#### **d) Struktur Birokrasi**

Dalam implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, struktur birokrasi yang efektif dan efisien memainkan peran penting dalam mengoordinasikan dan mengelola berbagai kegiatan terkait pengembangan pariwisata. Struktur birokrasi yang baik akan memastikan adanya koordinasi yang lancar antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam struktur birokrasi implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai:

1. **Pembentukan Satuan Kerja:** Dalam struktur birokrasi, penting untuk membentuk satuan kerja atau unit tugas khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan rencana pengembangan pariwisata. Satuan kerja ini dapat berfungsi sebagai koordinator utama dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan dan program yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Linggai. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam konsisten dalam mengevaluasi satuan kerja yang sudah dibuat, sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.

2. **Pemetaan Tugas dan Tanggung Jawab:** Setiap instansi atau lembaga dalam struktur birokrasi harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan pengembangan pariwisata. Hal ini meliputi pembagian tugas dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dengan pemetaan tugas yang jelas, akan terjadi koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam berkerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan pariwisata Linggai, dalam hal ini dengan adanya objek wisata Linggai kegiatan Save Maninjau terlaksana dengan baik, setidaknya dalam penataan keramba disekitar kawasan objek wisata Linggai.
3. **Keterlibatan Instansi Terkait:** Dalam struktur birokrasi, perlu melibatkan berbagai instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan instansi lain yang memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan ini memastikan adanya kolaborasi antar instansi dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.
4. **Koordinasi dan Komunikasi Antarinstansi:** Struktur birokrasi yang baik harus mendorong koordinasi dan komunikasi yang efektif antarinstansi terkait. Pertemuan rutin, rapat koordinasi, dan saluran komunikasi yang terbuka harus ditekankan untuk memastikan informasi dan keputusan dapat dipertukarkan dengan cepat dan tepat antara instansi yang terlibat.
5. **Pengawasan dan Pengendalian:** Struktur birokrasi juga harus mencakup mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit internal, evaluasi kinerja, dan pemantauan progres implementasi rencana pengembangan. Pengendalian yang baik akan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan sumber daya dialokasikan dengan efisien. Dalam hal pengawasan dan pengendalian, Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan dan juga melibatkan inspektorat dalam pengawasan keuangan, hal ini disampaikan oleh KDPPPO Kabupaten Agam :

*"Kita melakukan pengawasan internal dalam aktifitas pembangunan dan jalanya Objek Wisata linggai, dalam hal pengelolaan keuangan pembangunan retribusi dan lainnya kita juga mengandeng Inspektorat Daerah Kabupaten Agam, hal ini kita lakukan agar perjalanan Objek Wisata Linggai bersih dari persoalan keuangan"*

Dengan adanya struktur birokrasi yang baik dalam implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, akan tercipta koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, pemetaan tugas yang jelas, komunikasi yang lancar, dan pengawasan yang teratur. Hal ini akan mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di objek wisata Linggai serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat dan lingkungan.

## **2. Kontribusi terhadap Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai**

Implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam implementasi rencana tersebut:

**Kepemimpinan yang kuat:** Adanya kepemimpinan yang kuat dan visioner dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah, instansi pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat berkontribusi dalam menjalankan dan mengawasi implementasi rencana pengembangan pariwisata. Kepemimpinan yang baik akan memberikan arah, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata Linggai. Seperti yang dijelaskan oleh KDPPPO Kabupaten Agam bahwa:

*"Pembangunan Objek Wisata Linggai dilaksanakan pada priode Bupati Indra Catrri, pada saat itu bapak bupati dengan semangatnya selalu menegaskan agar pembangunan berjalan dengan lancar dan tepat waktu, juga konsisten melaksanakan banyak kegiatan di kawasan Linggai, Begitu juga dengan Bupati Andriwarman, dari 2021 hingga saat sekarang ini, sudah tidak terhitung lagi kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Linggai, hal ini*

*membuktikan bahwa pimpinan daerah konsisten dalam pembangunan dan pengembangan Objek Wisata Linggai”*

Keterlibatan masyarakat lokal: Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses implementasi sangat penting. Partisipasi mereka dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata Linggai. Melalui keterlibatan ini, masyarakat dapat memberikan masukan, pengalaman, dan pengetahuan lokal yang berharga dalam mengoptimalkan pelaksanaan rencana pengembangan. “Hingga saat ini masyarakat konsisten dalam melakukan berbagai kegiatan lokal di kawasan linggai seperti Festival Danau Maninjau, Barakik dan sebagainya” ujar Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Alokasi sumber daya yang memadai: Keberhasilan implementasi rencana pengembangan pariwisata Linggai sangat tergantung pada ketersediaan dan alokasi sumber daya yang memadai. Sumber daya finansial, manusia, teknologi, dan infrastruktur yang cukup akan mendukung pelaksanaan kegiatan dan program yang direncanakan. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang efisien dan transparan juga penting untuk memastikan penggunaan yang optimal. Total pembangunan Linggai 2017-2021 adalah kurang lebih 17 M, hal ini sudah melebihi perencanaan yang diusulkan pada tahun 2016, dikutip dari <https://sumbarsatu.com/berita/13821-linggai-akan-berkembang-menjadi-objek-wisata-dan-pasar-kuliner>, pada tahun 2016 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Agam, Hadi Suryadi, SH menyatakan seperti berikut

*“Dijelaskan, dalam proposal yang diajukan tersebut, kebutuhan pembangunan Linggai sekitar Rp10 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk merehab dan mengembangkan objek tersebut, seperti untuk perbaikan pintu gerbang masuk objek, pembangunan kios souvenir, kantor pengelola, teater terbuka, musala, WC umum, menara wisata, penampungan ikan, pujasera, water boom area, restoran, dan cottage keluarga, gazebo, jembatan dan tempat pemancingan, dan pembangunan prasarana lingkungan, termasuk area parkir, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan.”*

Pada dasarnya dana yang digelontorkan sudah lebih dari perencanaan tahap awal. Hal ini mengartikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Agam konsisten dalam pembangunan Kawasan Linggai. Pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan: Adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan merupakan faktor penting dalam implementasi rencana pengembangan pariwisata Linggai. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan akan membantu mengidentifikasi permasalahan, memperbaiki kelemahan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Konsistensi kebijakan: Konsistensi kebijakan dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam jangka panjang sangat penting. Kebijakan yang stabil dan terkait dengan pengembangan pariwisata Linggai akan memberikan kepastian dan kontinuitas dalam pelaksanaan rencana pengembangan, sehingga mendorong investasi, kerjasama, dan partisipasi yang lebih baik.

Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung: Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, transportasi, akomodasi, sanitasi, dan sarana pendukung pariwisata lainnya, menjadi faktor penting dalam implementasi rencana pengembangan. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi wisatawan yang berkunjung ke Linggai. Peningkatan kapasitas dan pelatihan: Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi para pelaku pariwisata, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya merupakan faktor yang berkontribusi terhadap implementasi yang berhasil. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ditingkatkan akan meningkatkan daya saing, inovasi, dan pelayanan dalam industri pariwisata. Konservasi lingkungan dan keberlanjutan: Pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk konservasi alam, pengelolaan limbah, pengurangan dampak negatif, dan promosi praktik pariwisata berkelanjutan, merupakan faktor penting dalam implementasi rencana pengembangan pariwisata Linggai. Upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang dan mempertahankan daya tarik wisata Linggai.

Promosi dan pemasaran: Upaya promosi dan pemasaran yang efektif merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan rencana pengembangan pariwisata Linggai. Promosi yang tepat sasaran, kampanye branding, kehadiran dalam pameran pariwisata, dan penggunaan media sosial serta teknologi digital akan membantu meningkatkan visibilitas, minat, dan kunjungan wisatawan ke Linggai. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas,

implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai dapat dilakukan dengan lebih baik dan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pengembangan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, bandara dan sarana transportasi lainnya sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas ke kawasan pariwisata Linggai. Investasi dalam infrastruktur akan memfasilitasi pertumbuhan pariwisata dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Kemudian Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, penelitian ini menekankan perlunya memprioritaskan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya perlindungan alam, pengelolaan limbah dan pelestarian budaya lokal harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan pariwisata. Praktik-praktik ramah lingkungan akan membantu mempertahankan keunikan dan daya tarik kawasan pariwisata Linggai.

Keterlibatan aktif masyarakat lokal juga terbukti menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi Rencana Induk. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan pelatihan dan menciptakan peluang ekonomi akan memberikan dampak positif pada pembangunan pariwisata serta memperkuat ikatan antara masyarakat dan kawasan wisata. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memperhatikan potensi pariwisata, pelaksanaan rencana induk, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat lokal, implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai memiliki peluang besar untuk berhasil mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Selain memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat, kawasan ini juga menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

## REFERENSI

- Antara Sumbar (2017) 'Sumbar Bantu Bangun OW Linggai'. Available at: <https://sumbar.antaranews.com/berita/200754/sumbar-bantu-bangun-objek-wisata-linggai-agam>.
- Arifa A (2022) Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis, dan Contohnya. Available at: <https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian/>.
- BPS (2021) 'kontribusi pariwisata terhadap perekonomian indonesia'. Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/03/1892/kontribusi-pariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia-2020.html>.
- Butler, R. (1980) 'The Tourism Area Life Cycle', Vol 1. Available at: <https://doi.org/10.21832/9781845410278>.
- Butler, R.W. (1993) 'Tourism Development in Small Islands across the World'.
- D. Getz (1991) 'Tourism Planning and Destination Management'.
- Direktorat Jenderal Pariwisata (2014) Panduan Pelaksanaan Perencanaan Pariwisata Daerah. Direktorat Jenderal Pariwisata.
- Fanny Febriani (2016) 'Pengembangan Pariwisata dan Dampaknya terhadap Ekonomi Masyarakat di Daerah Wisata'.
- Ida Ayu Diah Laksmi Gayatri (2020) 'Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusa Penida Di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali'.
- Indriastuti, W.A. (2020) 'Analisa Daya Tarik Wisata, Fasilitas Dan Aksesibilitas Terhadap Keputusan Berkunjung Ke De Tjolomadoe Karanganyar Jawa Tengah'.
- Inskeep, E. (1991) 'An integrated and sustainable development approach'.
- John W. Creswell (2015) Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. 3rd edn. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juliansyah Noor (2015) Metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi, & karya ilmiah. 5th edn. Jakarta.
- Lexy J. Moleong (2018) Metodologi penelitian kualitatif. 38th edn. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. N. Nafi'an dan E. Yuliana (2018) 'Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata: Studi Kasus di Kabupaten Blitar'.
- Mair, H. (2002) Community-Based Tourism. Springer, Cham.
- Pakhudin, Arenawati, T.S. (2022) 'Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang'.

- Saiful, M., & Harun, A. (2019) 'Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Sukabum'. Available at: <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.7>.
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, R. (2015) 'Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata'.
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. 3rd edn. Bandung: Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto (1991) *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Ed. Rev. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahidmurni (2008) *Cara mudah menulis proposal dan laporan penelitian lapangan : pendekatan kualitatif dan kuantitatif (skripsi, tesis dan disertasi)*. 1st edn. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- World Tourism Organization (2013) 'A practical guide to sustainable water management in tourism destinations'.